

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta. H. Syafa'at Anugrah. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Amiruddin. H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Akadum. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- H.Salim. 2009. *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- H.Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanafa Publishing. Pekanbaru.
- Irwansyah. 2021. Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Indroharto. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- _____. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung.
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group. Depok.

- M. Kamal Hijaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Muh. Kadarisman. 2018. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Rajawali Press. Depok.
- Ni'matul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetris*. Nusa Media. Bandung.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Pranadamedia. Jakarta.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranadamedia. Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas H. 2018. *Hukum Kepegawaian*. FH UII Press. Yogyakarta.
- R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Safri Nugraha, et.al. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2004. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Sirajuddin, et.al. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Sentara Press. Malang.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sri Hartini, et.al. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- S.F.Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. FH UII Press. Yogyakarta.
- S.F.Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- Titik Triwulan. 2017. *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan & Jabatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ulbert Silalahi. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep*. Sinar Baru. Bandung.
- W. Riawan Tjandra. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Jurnal

- Arini Nur Annisa, et.al. "Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period". Awang Long Law Review. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long. Vol. 5. Number 1. 2022.
- Sadu Wasistiono. "Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)". Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol 1. Edisi 2. 2020.
- Supriyadi, "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 3. Edisi 3. 2015.
- M Ikbar Andi Endang. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Hukum Peratun. Vol. 1. Nomor 2. 2018.
- Anita Marlin Restu Prahastapa dkk. "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara". Diponegoro Law Journal. Vol. 6. Nomor 2. 2017.
- Budiamin Rodding. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". Tanjungpura Law Journal. Vol.1. Nomor 1. 2017 .

Mu'amar. "Analisis Kinerja Sekretariat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas, Fungsi di Kabupaten Donggala". Jurnal Katalogis. Vol. 3. Nomor 11. 2015.

Fadlan. "Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman". Soematra Law Review. Vol. 2. Nomor 1. 2019.

M Ikbar Andi Saleng. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Hukum Peratun. Vol. 1. Nomor 2. 2018.

M Ikbar Andi Saleng. "Kekuatan Hukum Pemerintah Dalam Menerbitkan Keputusan Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa". Jurnal Selat. Vol. 2. Nomor 1. 2014.

Skripsi

Asriadi. 2012. Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Skripsi. Program Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Heru Pratama. 2020. Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati di Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi. Program Sarjana Hukum. Universitas Andalas. Padang.

Dickie Muhdi Gailea. 2019. Telaah Kritis Mengenai Tugas dan Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi. Program Sarjana Hukum. Universitas Gadjahmada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Atas Nama Abdul Hayat Gani

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Website/Internet

Caritau.com.

<https://caritau.com/post/kemendagri-akui-pengutipan-nomor-surat-pencopotan-sekprov-sulsel-salah-kok-bisa> Diakses tanggal 19 Mei 2023.

<https://caritau.com/post/jaksa-pengacara-negara-kejagung-lakukan-banding-soal-putusan-gugatan-mantan-sekprov-sulsel-di-ptun> Diakses tanggal 12 Juli 2023.

Detik.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6678520/ptun-jakarta-perintahkan-presiden-kembalikan-abdul-hayat-jadi-sekda-sulsel> Diakses tanggal 7 Juni 2023.

Fajar.

<https://bacapesan.fajar.co.id/2022/12/15/tak-terima-diberhentikan-sebagai-sekprov-sulsel-ini-langkah-yang-ditempuh-abdul-hayat/> Diakses tanggal 7 Juni 2023.

HeraldSulsel.

<https://sulsel.herald.id/2022/12/15/terkuak-hasil-evaluasi-kinerja-abdul-hayat-gani-ternyata/2/> Diakses tanggal 7 Juni 2023.

Kompas.

<https://regional.kompas.com/read/2022/12/15/135608778/diberhentikan-mendadak-mantan-sekda-sulsel-gugat-presiden-jokowi> Diakses tanggal 19 Mei 2023.